

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PELABUHAN KOTA TEGAL**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh:

**Laila Sundari**

**NPM: 4221500005**

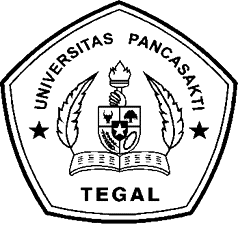
Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN (D3)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



**PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PELABUHAN KOTA TEGAL**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Program Studi Manajemen Perpajakan (D3)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Laila Sundari**

**NPM: 4221500005**

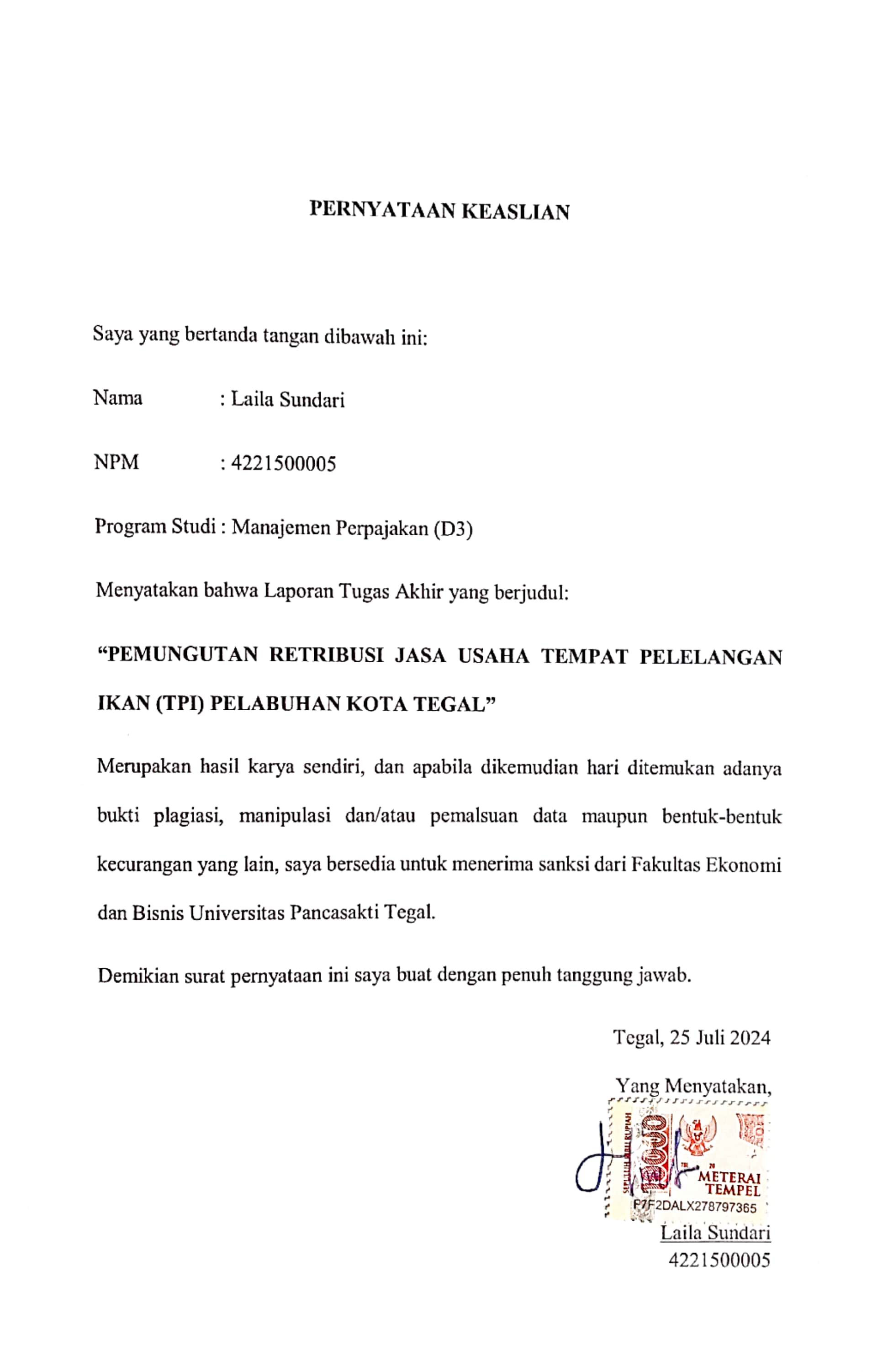
Diajukan Kepada:

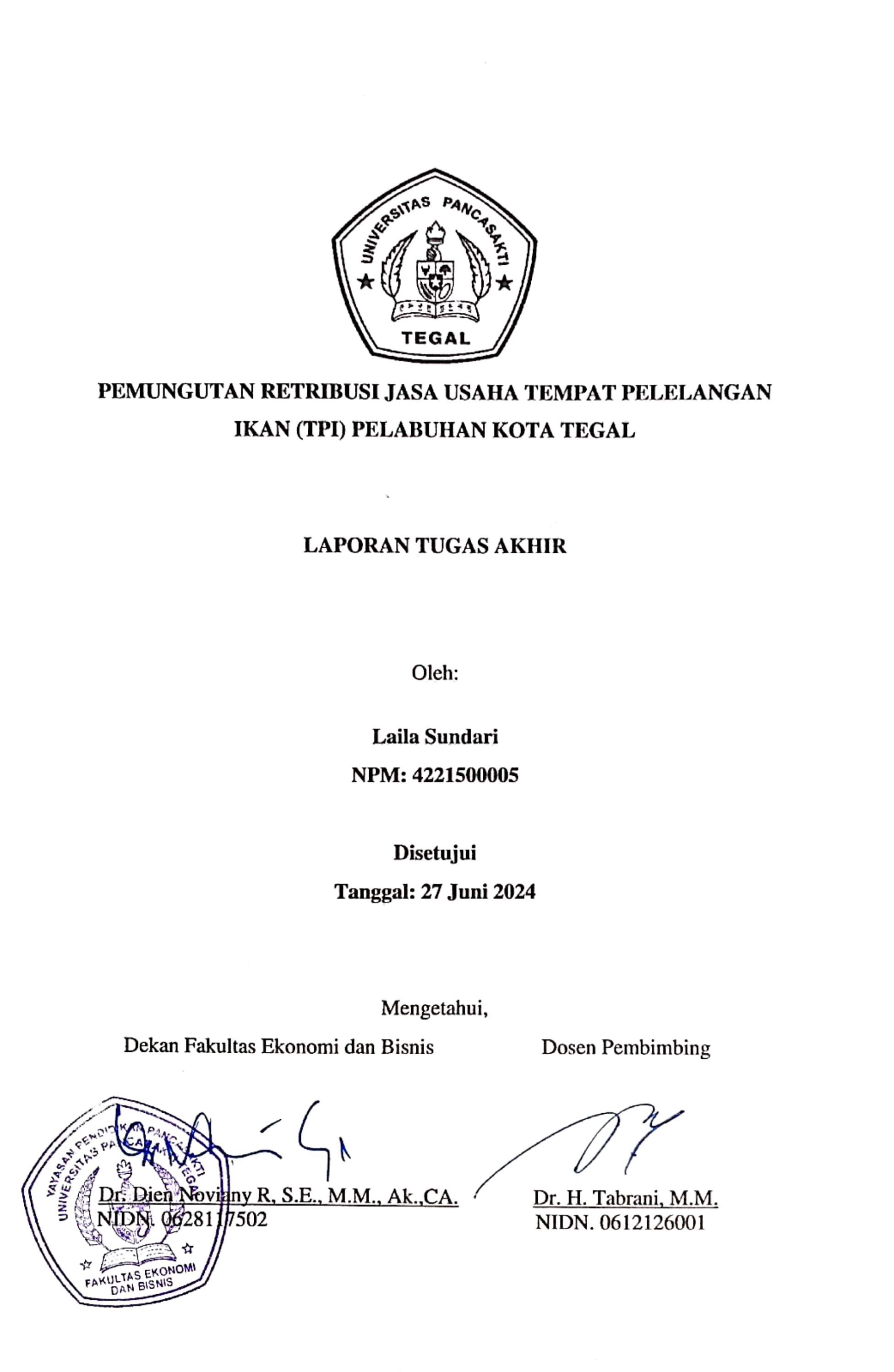
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN (D3)**

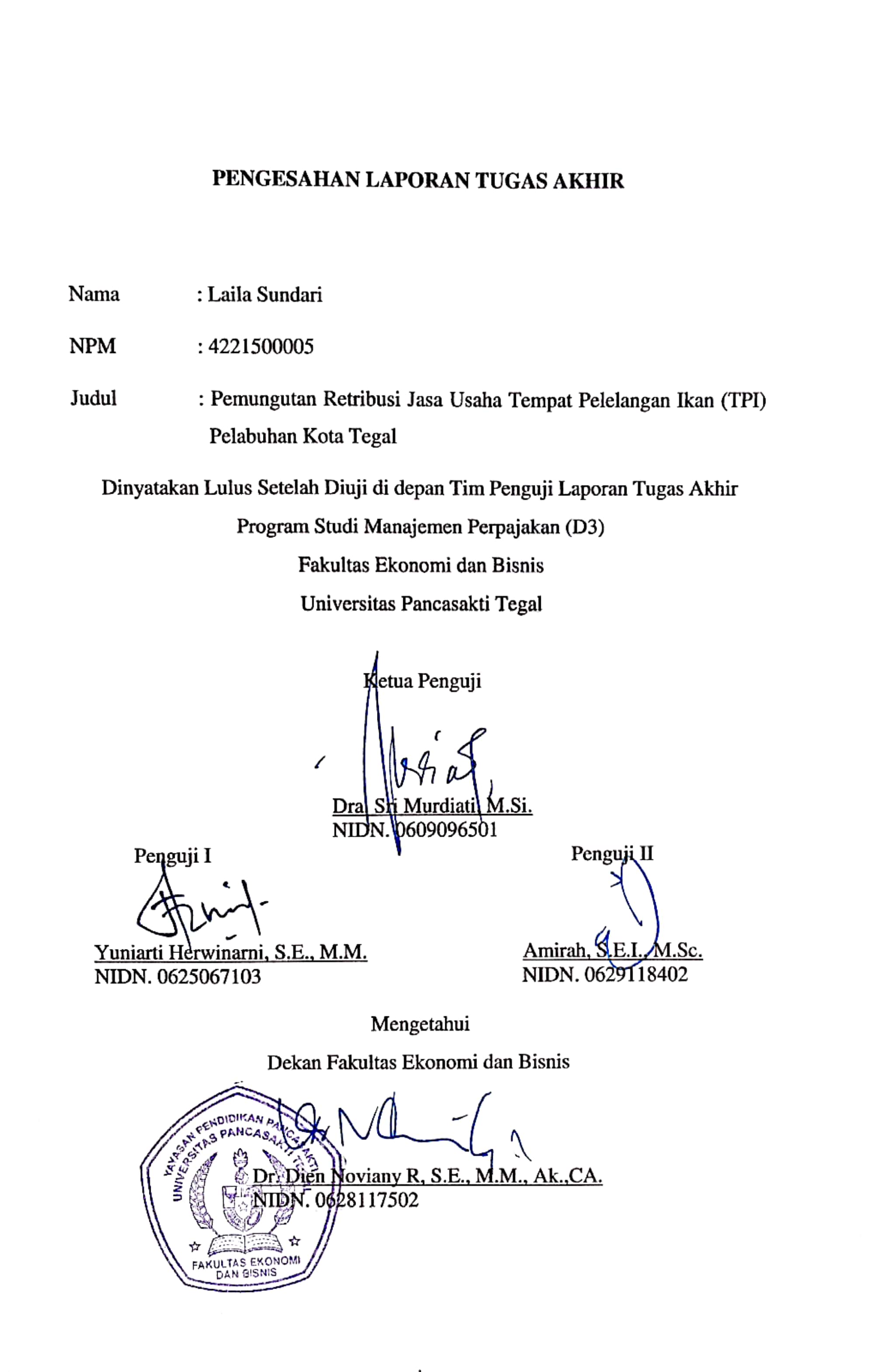
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**



****

****

**KATA PENGANTAR**

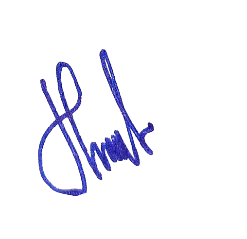
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PEMUNGUTAN** **RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PELABUHAN KOTA TEGAL”.**

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) di Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ibu Mei Rani Amalia, S.E., M.M., Selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Tabrani, M.M., Selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
4. Bapak Sirat Mardanus, S.Pi., M.Si., Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal.
5. Ibu Laela Rachmawati, S.E., Selaku Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal.
6. Bapak Herry Pramardikdo, A.Md., Selaku Kepala UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal.
7. UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal.
8. TPI Pelabuhan Kota Tegal.
9. Bapak Zamroni dan Ibu Novita S. M. sebagai orang tua yang telah memberikan dukungan non material maupun material.
10. Alm. kakek, alm. nenek serta saudara yang telah memberi dukungan material ataupun non material.
11. Teman – teman dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga hasil Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 25 Juli 2024

Laila Sundari

NPM. 4221500005

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN …………………………………........................... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Ruang Lingkup Pembahasan 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 9

D. Metode Pengumpulan Data 10

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PELELANGAN

IKAN PELABUHAN KOTA TEGAL ……………........................... 12

A. Dasar Hukum 12

B. Visi dan Misi 14

C. Struktur Organisasi 14

D. Tugas Pokok 15

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK …………………………….. 22

A. Tinjauan Teori 22

B. Praktek 54

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………. 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 72

**DAFTAR TABEL**

Tabel Halaman

1. Produksi, Raman dan Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal

Tahun 2022-2023 8

1. Produksi, Raman dan Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal

Tahun 2010-2023 13

1. Perbedaan Antara Retribusi Daerah dan Pajak Pusat 30
2. Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal 52
3. Contoh Perhuitungan Tarif Retribusi Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal 53
4. Tarif Retribusi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal 58
5. Tarif Retribusi Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal 61

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar Halaman

1. Struktur Organisasi TPI Pelabuhan Kota Tegal 15

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Halaman

1. Surat Keterangan Magang dari DKPPP Kota Tegal 72
2. Contoh Daftar Urut Lelang Ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal 73
3. Pembongkaran Ikan Dari Kapal 74
4. Penimbangan Ikan Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 75
5. Contoh Karcis Timbang Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 76
6. Ikan Siap Lelang Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 77
7. Contoh Daftar Peserta Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal 78
8. Penyelenggaraan Lelang Ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal 79
9. Contoh Karcis Lelang Bakul Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 80
10. Contoh Belakang Karcis Lelang Bakul Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 81
11. Contoh Karcis Lelang Nelayan Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 82
12. Contoh Belakang Karcis Lelang Nelayan Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 83
13. Contoh SPB Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 84
14. Contoh Tarif Perhitungan Retribusi Bakul Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 85
15. Contoh SPU Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 86
16. Contoh Tarif Perhitungan Retribusi Nelayan

Di TPI Pelabuhan Kota Tegal 87

1. Juru Kebersihan Membersihkan TPI Pelabuhan Kota Tegal 88
2. Raman, Produksi dan Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal

Tahun 2010-2023 89

1. Visi dan Misi TPI Pelabuhan Kota Tegal 90
2. Struktur Organisasi TPI Pelabuhan Kota Tegal 91

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sumber daya perikanan serta kelautan adalah salah satu kelebihan alam dari Republik Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit (Vibriyanti, 2014:46). Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai jenis geografis negara kepulauan. Kepulauan Republik Indonesia memiliki 5,8 juta km2 laut (Mulyono, dkk., 2018:65) dan Republik Indonesia merupakan negara urutan kedua dengan garis pantai terpanjang didunia yaitu 99.083 km. Republik Indonesia ada antara dua kontinen, Kontinen Australia serta Kontinen Asia. Republik Indonesia pula dikelilingi dua lautan, yaitu Lautan Atlantik dan Lautan Hindia. Karena letak dari Republik Indonesia yang dikelilingi dua lautan tersebut, sehingga dengan otomatis Republik Indonesia mempunyai laut yang lapang dengan berbagai macam sumber daya perairan yang melimpah. Salah satu contoh dari perolehan laut Republik Indonesia yang melimpah tersebut ialah perolehan perikanan. Perolehan perikanan dimanfaatkan baik secara sektor perdagangan ataupun sebagai sumber kebutuhan (Yustianingsih, 2022:2).

Bidang perikanan adalah salah satu sektor pembangunan yang memiliki peranan strategis dalam menciptakan perekonomian skala nasional dan bidang perikanan dapat menjadi penghasil devisa negara yang besar. Pembangunan perikanan dimaksudkan menjadi pembangunan nasional, ditujukan dalam membantu terwujudnya tujuan maupun cita-cita mulia dari Republik Indonesia untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan adil. Dengan adanya kekuatan kelautan, sektor perikanan diharapkan dapat menjadi pendukung atau membantu dalam tercapainya tujuan tersebut (Yustianingsih, 2022:2).

Kota Tegal sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia pada Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai panjang garis pantai sekitar 7,5 km (Mulyono, dkk., 2018:65). Apabila dilihat dari segi sejarah, Kota Tegal termasyhur dengan nelayan yang andal dari masa kolonial Belanda. Kota Tegal pula termasyhur menjadi pusat pelabuhan serta perniagaan yang banyak dikunjungi oleh para pelaut dari berbagai wilayah nusantara maupun negara asing. Kehidupan bersosial penduduk pesisir diwarnai oleh percampuran kebudayaan diantara masyarakat pendatang dan masyarakat asli sehingga menyebabkan Kota Tegal menjadi salah satu daerah perniagaan pada wilayah pantura yang senantiasa dinamis (Vibriyanti, 2014:46).

Secara geografis, Kota Tegal berada antara 109⁰08′ - 109⁰10′ Bujur Timur serta 6⁰50′ - 6⁰53′ Lintang Selatan. Luas Kota Tegal ialah 39,68 km2 atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal ada pada daerah pantura. Pada denah orientasi Provinsi Jawa Tengah, ada pada daerah barat, yang membentang sejauh 6,7 km utara menuju selatan serta 9,7 km barat menuju timur. Melihat pada kondisi geografi, letak Kota Tegal amat strategis menjadi penyambung rute perekonomian nasional serta daerah pada wilayah pantura yakni mulai barat menuju timur meliputi Jakarta, Tegal, Semarang dan Surabaya. Untuk daerah tengah serta selatan dari pulau jawa meliputi Jakarta, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, dan Surabaya. Keadaan tersebut dapat menjadikan Kota Tegal mempunyai kekuatan perikanan yang melimpah serta berpotensi memberikan kontribusi untuk perekonomian daerah.

Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 yakni otonomi suatu daerah adalah kewajiban, wewenang serta hak daerah otonom dalam menyusun atau mengelola sendiri perihal pemerintah serta kebutuhan penduduk setempat sesuai mekanisme. Sesuai ketentuan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah dalam menyusun serta merencanakan seluruh urusan pemerintah daerah diluar urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menciptakan ketentuan daerah dengan rangka pemberian jasa, peningkatan ikut serta maupun memberdayakan rakyat untuk tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat (Siregar K., 2018:94).

Otonomi daerah adalah titik pokok penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu otonomi daerah dilakukan dengan tujuan untuk menolong pemerintah pusat dalam melayani rakyat serta penyelenggaraan rancangan pembangunan. Prinsip otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi yang selebar-lebarnya dengan memberikan wewenang untuk mengatur perihal daerah diluar perihal pusat. Prinsip otonomi dapat dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas serta nyata. Prinsip tersebut meliputi (Siregar K., 2018:94):

1. Prinsip otonomi akuntabilitas, adalah otonomi yang pelaksanaannya harus selaras dengan tujuan serta maksud dari otonomi tersebut.
2. Prinsip otonomi nyata, yaitu prinsip dalam menangani perihal daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan, fungsi, kewajiban dan tugas yang ada serta potensial untuk dikembangkan berdasarkan potensi yang ada.

Wewenang daerah yang dimaksudkan yaitu mencakup wewenang pada semua sektor pemerintah daerah kecuali wewenang disektor kebijakan negara asing; moneter serta fiskal nasional; peradilan; keamanan; agama; pertahanan; serta kewenangan sektor lain. Yang dimaksud dari kewenangan sektor lain meliputi (Lestari, dkk., 2020:226):

1. Standarisasi nasional,
2. Dana perimbangan keuangan,
3. Konservasi,
4. Kebijakan mengenai perencanaan nasional serta pengendalian pembangunan berskala makro,
5. Metode administrasi negara serta lembaga perekonomian negara,
6. Pendayagunaan,
7. Sumber Daya Alam (SDA) dan ilmu pengetahuan terapan tinggi yang strategis, dan
8. Pembinaan serta pemberdayaan manusia sebagai sumber daya.

Dengan demikian kebijakan otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun sekaligus merencanakan urusannya sendiri dalam meningkatkan tepat guna pelaksanaan pemerintah daerah dalam memberikan jasa kepada rakyat luas. Supaya terselenggaranya otonomi, maka memanfaatkan segenap kekuatan yang ada didaerah dan dilakukan dengan mekanisme adil. Oleh sebab itu, menemukan sumber pendanaan yang tepat sangatlah penting. Sektor perikanan dapat menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Yustianingsih, 2022:2).

Untuk membantu optimalisasi dari kekuatan kelautan dan perikanan tersebut maka disediakan fasilitas berupa TPI (Buton, dkk., 2023:650). TPI adalah fasilitas satu kesatuan dari daerah perairan dan daerah daratan dengan fasilitas yang tersedia dibasis buatan maupun alami. Disamping itu, TPI adalah sebagai pusat dari pengembangan ekonomi dalam sektor perikanan baik secara produksi, pengelolaan maupun pemasarannya (Amiruddin, 2014:254).

TPI memiliki manfaat yang bermacam-macam untuk nelayan, bakul maupun penduduk sekitar. Manfaat yang didapatkan adalah:

1. Sebagai tempat untuk melaksanakan transaksi jual beli secara terbuka serta saling menguntungkan,
2. Harga yang disepakati tinggi sehingga tidak merugikan nelayan,
3. Konsumennya luas seperti pabrik pengolahan ikan, restoran maupun luar wilayah, dan
4. Dapat memperoleh ikan dengan beragam jenis.

Untuk penduduk sekitar dapat membeli ikan dengan harga yang layak. Mengingat pentingnya TPI untuk menopang laju perkembangan penduduk serta menciptakan kemudahan dalam aktivitas penduduk sehingga TPI sangat perlu untuk diselenggarakan. TPI pula bermanfaat sebagai media bersilaturahmi maupun berkumpul antara penduduk satu dengan penduduk lain yang tinggal disekitar lingkungan TPI tersebut (Triyanti, 2011:23).

Tujuan didirikannya TPI yaitu untuk mencegah nelayan terlibat dalam monopoli harga, sehingga nelayan mendapatkan harga yang wajar. Sistem dari lelang ikan pada dasarnya terjadi dalam sistem pasar dengan metode perantara yaitu sebagai tukang tawar. Penawar tertinggi berhak mengambil ikan yang dilelang sesudah melalui mekanisme penawaran umum (Buton, dkk., 2023:649). Dengan terselenggaranya TPI secara tidak langsung mengurangi peran dari para tengkulak sehingga kerugian para nelayan berkurang yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan maupun kemakmuran nelayan (Nurlinda & Saharruddin, 2013:250).

Fungsi utama TPI secara khusus adalah:

1. Sebagai fasilitas penunjang kegiatan nelayan untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan di laut,
2. Pengolahan serta penanganan perolehan ikan tangkapan, dan
3. Menjadi lokasi untuk melaksanakan penjagaan kapal ikan.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka sasaran serta tujuan yang akan dipenuhi oleh TPI adalah pemberian jasa dengan harapan keproduktifan penjualan perolehan tangkapan nelayan terus meningkat (Amiruddin, 2014:254).

Di Kota Tegal tersedia tiga TPI yang terbagi di beberapa daerah yang berada di Kota Tegal. Salah satunya ialah TPI Pelabuhan Kota Tegal. TPI Pelabuhan Kota Tegal dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelelangan Ikan Kota Tegal. Tujuan pengelolaan TPI pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2010 adalah:

1. Melancarkan pelaksanaan lelang;
2. Kestabilan harga penjualan ikan;
3. Peningkatan taraf kehidupan serta kemakmuran nelayan;
4. Peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Menanggung berkelanjutan sumber daya ikan; dan
6. Mendapatkan data base tangkapan ikan secara tepat.

Dalam pelaksanaan dari aktivitas lelang ikan, adanya pemungutan biaya retribusi TPI yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam peningkatan PAD. Sebagaimana pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 20 bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selaras dengan kebijakan berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana suatu pemerintahan daerah dengan terus ditingkatkan supaya dapat memikul sebagai biaya pembelanjaan yang dibutuhkan untuk tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah pada tiap-tiap periode meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah secara nyata, merata serta tanggung jawab mampu terlaksana (Toduho, dkk., 2014:1092).

Retribusi TPI adalah salah satu kategori retribusi jasa usaha mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan menjadikan retribusi jasa usaha TPI sebagai sumber penerimaan PAD maka pembayaran retribusi jasa usaha TPI menjadi kewajiban yang harus dibayarkan nelayan dan bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal. Berikut ini adalah produksi, raman, retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal pada tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 1   
Produksi, Raman dan Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal

Tahun 2022-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Produksi (kg)** | **Raman (Rp)** | **Retribusi (2,78%)** |
| 2022 | 10.717.412 | 187.291.746.000 | Rp. 5.206.690.536 |
| 2023 | 11.342.267 | 159.540.260.000 | Rp. 4.435.219.228 |

Sumber: UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal

Pada tabel diatas produksi di TPI Pelabuhan Kota Tegal tahun 2023 meningkat dibandingkan produksi tahun 2022. Pada 2022 produksi sejumlah 10.717.412 kg dengan nilai raman sebesar Rp. 187.291.746.000 yang dipungut retribusi jasa usaha TPI sebanyak Rp. 5.206.690.536. Untuk tahun 2023 nilai produksi sebanyak 11.342.267 kg dengan raman sebesar Rp. 159.540.260.000 yang dikenakan retribusi jasa usaha TPI sejumlah Rp. 4.435.219.228.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, oleh karena itu penulis bertujuan untuk menulis Laporan Tugas Akhir berjudul “PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PELABUHAN KOTA TEGAL”.

1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ruang lingkup pembahasan pada tulisan Laporan Tugas Akhir meliputi:

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal?
3. Apa hambatan dan kendala penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dan kegunaan penulisan adalah:

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
4. Manfaat Penulisan

Berikut beberapa manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir meliputi:

1. Bagi Penulis

Penulisan Laporan Tugas Akhir diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap:

1. Dasar hukum penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
2. Penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
3. Hambatan dan kendala penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.
4. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Sebagai pembendaharaan referensi Laporan Tugas Akhir dengan topik sejenis.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Adapun Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengambil literatur diberbagai macam jenis sumber-sumber yang relevan seperti internet, jurnal, peraturan-peraturan daerah, undang-undang, buku dan lain sebagainya untuk mempermudah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengamati objek serta bertujuan untuk melihat pola tingkah laku untuk memperoleh tanggapan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Melakukan observasi mampu menghasilkan suatu data yang relevan (Yustianingsih, 2022:9). Observasi dilakukan di TPI Pelabuhan Kota Tegal terkait dengan penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI. Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan cara menyaksikan langsung proses penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber-sumber informasi yang terdiri dari catatan tertulis atau cetak tentang kejadian masa lalu yang bersifat formal. Meliputi data yang dikumpulkan melalui berbagai bentuk seperti dokumen, catatan administrasi, dan lain-lain yang sesuai (Yustianingsih, 2022:10).

**BAB II  
GAMBARAN UMUM TEMPAT PELELANGAN IKAN  
PELABUHAN KOTA TEGAL**

1. **Dasar Hukum**

TPI Pelabuhan Kota Tegal berdiri tahun 1980. Saat itu TPI Pelabuhan Kota Tegal dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mina. KUD Karya Mina merupakan salah satu bagian dari KUD Mina Baruna Provinsi Jawa Tengah. Ketika itu penarikan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal sebesar 8% yang terdiri atas 5% dari nelayan dan 3% dari bakul. Sebanyak 8% tersebut, jumlah untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,5%, untuk Pemerintah Daerah Kota Tegal sebesar 1%, dan untuk KUD Karya Mina sebesar 5,5%. Dari sejumlah KUD Karya Mina sebesar 5,5% digunakan sebagai biaya opersional KUD Karya Mina, dana saving, dana pelatihan nelayan, dana paceklik, dan lain-lain.

Saat tahun 2000 penarikan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal berubah menjadi sebesar 5% yang terdiri dari 3% nelayan serta 2% bakul. Komposisi bagi hasil retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah memperoleh sebesar 0,9%, untuk Pemerintah Daerah Kota Tegal sebesar 1% dan KUD Karya Mina mendapatkan 3,1%.

Pada tahun 2010 pemungutan retribusi TPI pelabuhan sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa pengelolaan TPI dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Adapun pemungutan retribusi TPI pelabuhan sesuai pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI Pasal 15 yaitu setiap jasa serta penggunaan sarana TPI Pelabuhan Kota Tegal dipungut retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal senilai 2,78% atas harga lelang produksi ikan yaitu 1,66% dari nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal dan 1,12% dari bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal. Dengan demikian KUD Karya Mina sudah tidak mendapatkan bagian dari pemungutan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal. Berikut ini adalah produksi, raman dan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal dari tahun 2010 hingga tahun 2023:

Tabel 2  
Produksi, Raman dan Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal  
Tahun 2010-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Produksi (kg)** | **Raman (Rp)** | **Retribusi (2,78%)** |
| 2010 | 17.746.862 | 129.440.011.000 | Rp. 1.229.680.105 |
| 2011 | 22.750.868 | 178.308.347.000 | Rp. 4.956.972.047 |
| 2012 | 24.042.995 | 192.021.330.000 | Rp. 5.338.192.974 |
| 2013 | 19.307.069 | 213.103.349.000 | Rp. 5.924.273.102 |
| 2014 | 21.053.881 | 234.927.688.000 | Rp. 6.530.989.726 |
| 2015 | 20.685.530 | 248.590.888.000 | Rp. 6.910.826.686 |
| 2016 | 19.244.608 | 242.355.146.000 | Rp. 6.737.473.058 |
| 2017 | 14.803.347 | 230.114.206.000 | Rp. 6.398.008.927 |
| 2018 | 13.967.636 | 199.007.862.000 | Rp. 5.532.418.563 |
| 2019 | 13.407.297 | 162.152.491.000 | Rp. 4.507.839.249 |
| 2020 | 12.901.938 | 177.414.073.000 | Rp. 4.932.111.229 |
| 2021 | 11.008.699 | 177.326.226.000 | Rp. 5.053.086.624 |
| 2022 | 10.717.412 | 187.291.746.000 | Rp. 5.206.690.536 |
| 2023 | 11.342.267 | 159.540.260.000 | Rp. 4.435.219.228 |

Sumber: UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal

Tahun 2024 pemungutan retribusi TPI pelabuhan mengalami perubahan pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan sistem tarif per m2 serta per jenis ikan baik nelayan dan bakul.

1. **Visi dan Misi**

Visi serta misi merupakan bagian penting yang digunakan agar dalam penyelenggaraan suatu kegiatan mencapai keadaan yang diinginkan (Syafitri, dkk., 2023:234).

1. Visi

Visi adalah pandangan mengenai masa depan secara nyata untuk mewujudkannya (Romlah & Kamaludin, 2023:18). Visi dari TPI Pelabuhan Kota Tegal adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif.
2. Misi

Misi yaitu penguraian dari visi berupa tanggung jawab, perencanaan dari aktivitas serta tugas yang memiliki fungsi sebagai arah terwujudnya visi (Romlah & Kamaludin, 2023:20). Misi TPI Pelabuhan Kota Tegal yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi.
2. **Struktur Organisasi**

Menurut Hasibuan (dalam Juru, 2020:412) struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan model dari organisasi, jenis wewenang pejabat serta kedudukan departemen organisasi, hubungan serta bidang pekerjaan, tanggung jawab serta batas perintah, sistem pimpinan organisasi dan rentang kendali. Struktur organisasi TPI Pelabuhan Kota meliputi:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
2. Kepala UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal
3. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal
4. Kepala TPI Pelabuhan Kota Tegal
5. Kepala Urusan TPI Pelabuhan Kota Tegal
6. Juru dan Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal
7. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal

Sumber: UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal

Gambar 1  
Struktur Organisasi TPI Pelabuhan Kota Tegal

1. **Tugas Pokok**
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal

Menurut Peraturan Wali Kota Tegal No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal Pasal 4 ayat (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal memiliki tugas membantu Wali Kota Tegal melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan, bidang pertanian dan peternakan serta bidang pangan;
4. Pembinaan dan fasilitas di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
6. Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Tegal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Kepala UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal

Pada Peraturan Wali Kota Tegal No. 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal Pasal 5 ayat (1) Kepala UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal memiliki tugas menjalankan aktivitas teknis operasional dan/atau aktivitas teknis penunjang tertentu dinas di bidang pelelangan ikan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kepala UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pelelangan ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelelangan ikan;
3. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelelangan ikan;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal

Peraturan Wali Kota Tegal No. 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal Pasal 11 menjelaskan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemonitoran, evaluasi dan pelaporan di bidang program, keuangan, umum serta kepegawaian, meliputi:

1. Perencanaan serta program kerja;
2. Keuangan;
3. Penyempurnaan perihal tata usaha;
4. Hukum;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Perihal rumah tangga;
7. Kerjasama;
8. Perihal arsip;
9. Dokumen;
10. Hal tata laksana serta perihal organisasi;
11. Perihal hubungan masyarakat;
12. Kepegawaian;
13. Pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pelelangan Ikan Kota Tegal.
14. Kepala TPI Pelabuhan Kota Tegal

Kepala TPI Pelabuhan Kota Tegal mempunyai tugas memimpin seluruh aktivitas penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa TPI. Dalam menjalankan tugasnya Kepala TPI Pelabuhan Kota Tegal terbantu dengan:

1. Kepala Urusan Teknik Lelang
2. Kepala Urusan Keuangan
3. Kepala Urusan Tata Usaha
4. Kepala Urusan TPI Pelabuhan Kota Tegal

Kaur TPI Pelabuhan Kota Tegal terdiri atas:

1. Kepala Urusan Teknik Lelang

Kaur teknik lelang membantu Kepala TPI Pelabuhan Kota Tegal perihal menjalankan pengaturan lelang ikan seperti pembongkaran ikan, penimbangan ikan dan melelangkan ikan.

1. Kepala Urusan Keuangan

Kaur keuangan membantu kepala TPI menjalankan tugas sebagai penerima dan penyelesaian atas pembayaran retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal.

1. Kepala Urusan Tata Usaha

Kaur tata usaha membantu kepala TPI melakukan pengaturan pelaksanaan administrasi tata usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.

1. Juru dan Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal

Tugas dari Juru dan Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal adalah memberikan pelayanan penyelenggaraan pemungutan retribusi TPI. Juru dan Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal terdiri dari:

1. Juru Timbang

Juru Timbang TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas menimbang berat ikan dan pelabelan berat ikan.

1. Juru Lelang

Juru Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas menawarkan jenis ikan, berat ikan dan kualitas ikan pada setiap awal lelang ikan satu per satu hingga selesai.

1. Juru Tulis Karcis Lelang

Juru Tulis Karcis Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas menulis nama bakul pemenang lelang ikan, harga lelang ikan beserta tanggal lelang ikan pada karcis lelang bakul maupun nelayan.

1. Juru Buku Bakul

Juru Buku Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas mencatat nama bakul pemenang lelang ikan, jenis ikan, berat ikan, harga lelang ikan dan nomor karcis lelang pada buku bakul.

1. Juru Buku Nelayan

Juru Buku Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas menulis jenis ikan, berat ikan, nomor karcis lelang, harga lelang ikan, dan nama bakul pemenang lelang ikan di buku nelayan.

1. Juru Statistik

Juru Statistik TPI Pelabuhan Kota Tegal antara lain bertugas mencatat seluruh transaksi lelang ikan seperti jenis ikan, berat ikan, nama bakul pemenang lelang ikan, dan kode abjad kapal per hari maupun per bulan.

1. Kasir Terima

Kasir Terima TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas sebagai penerimaan pembayaran deposit (uang jaminan) untuk lelang ikan dari bakul.

1. Kasir Bayar

Kasir Bayar TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas membayarkan hak dari lelang ikan kepada nelayan.

1. Pembantu Kasir

Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal antara lain bertugas mengelompokkan karcis lelang bakul berdasarkan nama bakul pemenang lelang ikan, menulis kode abjad kapal pada karcis lelang bakul, menjumlah raman kotor, menghitung total dari raman kotor dan tarif retribusi TPI bakul maupun nelayan.

1. Juru Buku Retribusi

Juru Buku Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas merekap jumlah penerimaan retribusi TPI baik bakul maupun nelayan per hari.

1. Juru Administrasi Umum

Juru Administrasi Umum TPI Pelabuhan Kota Tegal bertugas untuk membantu pengadministrasian ketatausahaan TPI.

1. Juru Kebersihan

Juru Kebersihan TPI Pelabuhan Kota Tegal memiliki tugas memberikan pelayanan kebersihan atas sarana prasarana dan lokasi TPI.

1. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal

Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal antara lain bertugas sebagai penjaga keamanan lokasi TPI dan menjaga ketertiban jalannya kegiatan penyelengaraan lelang ikan.

**BAB III   
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

1. **Tinjauan Teori**
2. **Pendapatan Asli Daerah**
3. Definisi PAD Menurut Ahli
4. Menurut Abdul (dalam Ismiwati & Alfiani, 2021:53) PAD ialah pendapatan yang diterima dari hasil usaha daerah serta digunakan dalam membiayaan pelaksanaan suatu pemerintah daerah serta pembangunan daerah.
5. Menurut Ismail (dalam Ismiwati & Alfiani, 2021:53) PAD menjadi kriteria untuk mengurus ketergantungan daerah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan daerah serta pembangunan daerah.
6. Menurut Yani (dalam Siregar K., 2018: 96) PAD yaitu penerimaan yang bersumber pada perolehan pajak daerah, perolehan retribusi daerah, perolehan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, untuk tujuan menyerahkan kebebasan pemerintah daerah untuk menggali pendanaan sekaligus melakukan otonomi suatu daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi.
7. Menurut Warsito (dalam Ersita & Elim, 2016:890) PAD merupakan perolehan bersumber dari daerah serta pemungutannya dilakukan pemerintah daerah.
8. Menurut Widjaja (dalam Asmuruf, dkk., 2015:729) PAD yaitu biaya dasar suatu pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan penyelenggaraan daerah serta mencukupi pengeluaran daerah.
9. Sumber-Sumber PAD

PAD menjadi faktor pendapatan kas daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kemajuan penduduk daerah pada segenap aspek kehidupan. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku pemimpin yang membuat peraturan untuk menyelenggarakan perekonomian. PAD sebagai aspek penyokong pemerintah daerah dalam pelaksanaan ekonomi daerah serta penunjang kemajuan pembangunan daerah (Safira & Yafiz, 2022:4). Adapun yang menjadi sumber PAD yaitu:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.
5. Manfaat PAD

Perolehan yang berasal dari PAD menjadi faktor yang menunjang penyelenggaraan keperluan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin maupun membiayai program daerah dalam menciptakan kemakmuran rakyat. Pendapatan asli daerah menjalankan peranan untuk memajukan perekonomian daerah. Jika perolehan pendapatan asli daerah besar maka pembangunan ekonomi daerah akan lebih baik. Perolehan tersebut digunakan untuk tujuan pembiayaan daerah (Safira & Yafiz, 2022:4).

1. **Pajak Daerah**
2. Definisi Pajak Daerah Menurut Ahli
3. Menurut Mardiasmo (2016:16) pajak daerah merupakan iuran bersifat wajib kepada daerah terutang dari perorangan maupun suatu badan yang dapat dipaksakan selaras peraturan berlaku tanpa mendapatkan balasan langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi seluas-luasnya kemakmuran penduduk.
4. Menurut Samudra (dalam Siregar N. M., 2021:208) pajak daerah ialah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah selaras ketentuan kebijakan yang ditetapkan untuk anggaran pengeluaran daerah.
5. Ciri-Ciri Pajak Daerah
6. Pajak daerah dipungut pemerintah daerah sebagaimana ketentuan pajak daerah;
7. Pembayaran dari pajak daerah masuk ke kas pemerintah daerah;
8. Pada pembayaran pajak daerah tanpa memperoleh imbalan langsung untuk wajib pajak;
9. Pajak daerah dipungut sebab terjadi suatu kondisi, peristiwa, serta tindakan yang berdasarkan ketentuan pajak daerah dipungut pajak daerah;
10. Sifat pajak daerah bisa dipaksakan. Jika wajib pajak daerah tidak mematuhi kewajiban membayar pajak maka dikenai sanksi, baik sanksi denda atau pidana yang mengacu pada peraturan pajak daerah.
11. Kriteria Pajak Daerah
12. Pajak daerah bukan retribusi dan bersifat pajak;
13. Tidak memberikan pengaruh negatif terhadap ekonomi;
14. Objek pajak daerah bukan objek pajak pusat maupun pajak provinsi;
15. Memiliki potensi mencukupi;
16. Dasar pengenaan pajak daerah sesuai kebijakan kebutuhan publik;
17. Objek pajak daerah terletak di wilayah daerah tersebut serta memiliki mobilitas rendah dan hanya untuk pelayanan penduduk di wilayah daerah tersebut;
18. Menjaga kelestarian lingkungan; dan
19. Mencermati aspek kemampuan serta keadilan bagi penduduk.
20. Wajib Pajak Daerah

Wajib pajak daerah yakni perorangan atau suatu badan yang berdasarkan kebijakan pajak daerah diharuskan melaksanakan pembayaran pajak daerah yang terutang.

1. Jenis Pajak Daerah
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
4. Pajak Sarang Burung Walet;
5. Pajak Air Tanah;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pajak Penerangan Jalan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Restoran; dan
12. Pajak Hotel.
13. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu perolehan penghasilan daerah bersumber dari laba yang diperoleh perusahaan daerah berupa biaya rancang daerah serta bagian dalam rancangan biaya daerah yang diserahkan pada kas daerah (Dahlia, 2018:84). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Keuntungan atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah;
2. Keuntungan atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan pemerintah; dan
3. Laba dari penyertaan modal perkumpulan dagang penduduk atau perusahaan pihak swasta.
4. **Lain-Lain PAD Yang Sah**

Menurut Yani (dalam Asmuruf, dkk., 2015:731) lain-lain PAD yang sah ialah penghasilan yang berasal selain pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut ini adalah lain-lain PAD yang sah:

1. Tuntutan ganti rugi;
2. Penghasilan bunga;
3. Laba selisih nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing;
4. Perolehan menjual kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
5. Giro;
6. Potongan, komisi ataupun bentuk lain sebagai sebab dari menjual atau mengadakan barang atau pelayanan daerah; dan
7. Perolehan manfaat atau penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
8. **Retribusi Daerah**

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa publik dapat diasumsikan menjadi suatu bisnis. Jika suatu bisnis menyediakan jasa untuk konsumen, pemerintah daerah memberikan jasa tersebut untuk penduduk. Pendapat Freire & Garzon (dalam Anggoro, dkk., 2023:207) akibat dari memberikan jasa tersebut, maka penduduk diharuskan membayar jasa yang sudah didapat kepada pemerintah daerah. Harga yang wajib dibayar tersebut disebut *benefit taxation* yang artinya penduduk membayar utilitas yang sudah didapat serta berharap pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah tidak bertentangan dengan biaya pengeluaran. Dengan demikian bahwa pemerintah daerah tiada hanya mendapatkan penerimaan dari pajak daerah namun juga atas biaya jasa atau disebut sebagai retribusi (Anggoro, dkk., 2023:207). Berikut ini merupakan definisi dari retribusi:

1. Definisi retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 8 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Definisi Retribusi Menurut Ahli
3. Menurut Mahmudi (dalam Siregar K., 2018:96) retribusi daerah ialah sumber perolehan penunjang pendapatan asli daerah kedua sesudah pajak daerah.
4. Menurut Siahaan (dalam Ersita & Elim, 2016:891) retribusi adalah kewajiban membayar bagi masyarakat kepala negara sebab adanya pelayanan tertentu yang dimiliki pemerintah untuk masyarakat secara individu.
5. Menurut Mardiasmo (2016:20) retribusi adalah pemungutan daerah untuk membayar atas pelayanan izin tertentu yang spesifik tersedia atau pemberian dari daerah untuk kebutuhan perorangan ataupun suatu badan.
6. Menurut Munawir (dalam Damaryanti & Selvi, 2021:48) retribusi adalah iuran ke pemerintah yang mampu dipaksakan serta timbal balik dengan langsung bisa ditunjuk, memaksa bersifat ekonomi sebab siapa pun yang tidak merasa timbal balik pelayanan dari pemerintah maka tidak akan dipungut retribusi.
7. Menurut Darwin (dalam Damaryanti & Selvi, 2021:48) sumber perolehan suatu pemerintah daerah yakni retribusi. Retribusi berbeda dengan pajak, sebab retribusi lazimnya mempunyai hubungan balasan langsung, yang artinya wajib retribusi sebagai penerima yang memperoleh balasan langsung dari pembayaran retribusi tersebut.
8. Menurut Halim (dalam Gunawan, 2018:30) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilaksanakan pemerintah sebagai sebab terdapat balasan yang diberikan pemerintah daerah didasarkan dari prestasi retribusi pemerintah daerah mampu langsung dinikmati secara individu oleh penduduk serta diselenggarakan sesuai peraturan retribusi.
9. Menurut KJ (dalam Noviani & Masdjojo, 2020:5) retribusi berarti sebagai pembayaran yang dilaksanakan wajib retribusi sebagai pengguna dari jasa dan lazimnya ditujukan untuk mencukupi semua atau sebagian dari biaya.
10. Menurut Prawirohardjono (dalam Fauziah, dkk., 2019:29) retribusi daerah adalah pungutan daerah semacam pembayaran penggunaan atau sebab mendapat pelayanan usaha, pekerjaan atau milik daerah secara langsung atau tidak langsung.
11. Menurut Indra Bastian (dalam Mulyani & Ramdini, 2021:158) retribusi daerah adalah iuran yang dilaksanakan pemerintah daerah atas jasa serta pemakaian sarana prasarana publik yang telah tersedia pemerintah daerah untuk kebutuhan publik selaras dengan peraturan tentang retribusi.
12. Menurut Erly (dalam Ismiwati & Alfiani, 2021:54) definisi retribusi sebagai iuran atas pembayaran pelayanan yang diberikan pemerintah daerah pada sektor-sektor tertentu yang memperoleh timbal balik jasa secara langsung.
13. Menurut Soemitro dan Kaho (dalam Dahlia, 2018:84) retribusi menjadi pembayaran kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh wajib retribusi yang memakai pelayanan atau jasa pemerintah.
14. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah kota praja sebagai timbal balik jasa.
15. **Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Pusat**

Pada pelaksanaannya konsep retribusi berbeda dengan konsep pajak pusat. Konsep retribusi mempunyai beberapa perbedaan dengan konsep pajak pusat, sebagaimana tertera pada tabel ini (Anggoro, dkk., 2023:209):

Tabel 3  
Perbedaan Antara Retribusi Daerah dan Pajak Pusat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Faktor Pembeda** | **Retribusi** | **Pajak Pusat** |
| Keputusan | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat |
| Sumber Pendapatan | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat |
| Pihak Pemungut | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat |
| Imbalan/Jasa | Langsung | Tidak Langsung |
| Ketetapan | Peraturan Daerah | Undang-Undang |
| Sifat Pemungut | Tidak Dipaksakan | Dapat Dipaksakan |

Sumber: Anggoro, dkk., (2023)

Perbedaan retribusi daerah dengan pajak pusat berdasarkan tabel diatas meliputi:

1. Keputusan retribusi dari pemerintah daerah serta keputusan pajak pusat dari pemerintah pusat;
2. Retribusi adalah sumber pendapatan pemerintah daerah dan pajak pusat adalah sumber pendapatan pemerintah pusat;
3. Pihak pemungut retribusi adalah pemerintah daerah serta pihak pemungut pajak pusat adalah pemerintah pusat;
4. Retribusi memberikan imbalan atau jasa secara langsung dan pajak pusat memberikan imbalan atau jasa tidak langsung;
5. Retribusi ditetapkan pada peraturan daerah serta pajak pusat ditetapkan berdasar kepada undang-undang; dan
6. Retribusi tidak dipaksakan serta pajak pusat wajib dapat dipaksakan.
7. **Dasar-Dasar Pemungutan Retribusi**

Untuk pungutan retribusi daerah, pemerintah daerah memungut retribusi menurut pada dasar-dasar pemungutan retribusi antara lain meliputi (Toduho, dkk., 2014:1093):

1. Kebijakan terkait retribusi daerah tanpa adanya perbedaan atau pemberian istimewa untuk orang pribadi, suatu golongan atau agama tertentu;
2. Retribusi daerah tidak menjadi hambatan untuk keluar masuk pengangkutan barang didalam daerah maupun luar daerah;
3. Menyelenggarakan, mengubah atau menghapus retribusi daerah diatur pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku;
4. Pungutan retribusi daerah tanpa digadaikan ke pihak ketiga;
5. Tarif retribusi daerah ada dalam ketentuan daerah yang berlaku tentang retribusi; dan
6. Tarif suatu retribusi daerah ditetapkan untuk memberikan pelayanan langsung ke masyarakat.
7. **Prinsip Pemungutan Retribusi**

Bermula dari pendapat James McMaster (dalam Noviani & Masdjojo, 2020:4) pengajar ilmu ekonomi pada Sekolah Ilmu Administrasi Canberra Australia menjelaskan bahwa pungutan retribusi mempunyai dua prinsip. Prinsip ini meliputi:

1. Prinsip manfaat, prinsip tersebut menganut pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari suatu jasa maka wajib membayar sesuai dengan kebutuhan.
2. Prinsip kemampuan membayar, menurut prinsip ini pemungutan tarif retribusi berdasarkan dengan kesanggupan wajib retribusi, semakin sedikit pendapatannya maka semakin sedikit nilai yang dipungut dibanding dengan pendapatan tinggi.
3. **Tipologi Retribusi**

Bell (dalam Anggoro, dkk., 2023:210) menyebutkan bahwa tipologi retribusi dapat dikelompokkan berikut ini:

1. Biaya pengguna, merupakan pembayaran atas jasa yang dikonsumsi untuk mendapatkan manfaat secara langsung kepada pengguna. Contohnya:
2. Jasa contohnya pembuangan limbah, pengiriman surat;
3. Royalti dari Sumber Daya Alam (SDA), tol jalan raya, kanal serta jembatan;
4. Pemakaian lahan contohnya untuk tempat menggembalakan hewan ternak;
5. Izin serta lisensi;
6. Biaya untuk penjualan berulang sumber daya contohnya mineral, air serta kayu ataupun produk contohnya listrik;
7. Pembayaran atas sewa; dan
8. Pemakaian fasilitas contohnya taman alam.
9. Biaya peraturan, biaya tersebut serupa dengan pajak sebab biaya peraturan hanya berdasarkan kepada otoritas pemerintah dalam mengurus penyelenggaraan ekonomi tertentu. Biaya peraturan misalnya:
10. Hak cipta serta biaya paten;
11. Biaya paspor serta peradilan; dan
12. Biaya pemakaian jasa bea cukai.

Biaya peraturan berbeda dengan biaya pengguna. Biaya peraturan dapat mungkin mengguntungkan bagi pemakai atau tidak contohnya biaya paten dapat mungkin bermanfaat akan tetapi biaya untuk inspeksi dengan standar tertentu yang mungkin tidak menguntungkan.

Pada kasus terakhir, alasan ekonomis dalam peraturan tersebut yaitu kompensasi dari eksternal yang disebabkan tingkah laku yang tidak diatur. Keadaan ini berlaku bagi biaya eksternal serta manfaatnya contohnya biaya sertifikasi obat dapat ditetapkan lebih rendah dari biaya marginal dalam menutup eksternal yang positif akan timbul saat mengobati pasien terinfeksi penyakit menular.

1. **Alasan Pengenaan Retribusi**

Pendapat Brunori (dalam Anggoro, dkk., 2023:212) diperoleh tiga alasan suatu pemerintah daerah menyelenggarakan retribusi:

1. Penganekaragaman Sumber Penerimaan

Retribusi dapat memungkinkan suatu pemerintah daerah dalam menganekaragamkan perolehan penerimaan. Menilik keterbatasan sumber penerimaan lainnya, retribusi daerah dapat menjadi peran penting dalam metode keuangan publik pemerintah daerah. Metode yang benar membutuhkan dasar beragam dalam menjamin keseimbangan.

1. Pengendalian Lokal

Pemerintah daerah lazimnya tiada membutuhkan persetujuan legislatif dalam membebankan retribusi. Meski demikian didapati keterbatasan kebijakan serta pasar, retribusi sudah menunjang pemerintah daerah dalam mengatasi pemberontakan pajak atas properti.

1. Kedayagunaan Ekonomi

Alasan pengenaan retribusi yaitu bahwa biaya serta beban menjadi salah satu cara efektif dalam membiayai jasa pemerintah. Apabila melihat aspek kedayagunaan ekonomi, retribusi mengutip teori manfaat pajak. Hanya wajib retribusi yang mendapatkan jasa publik yang membayar retribusi. Retribusi dapat memungkinkan pemerintah daerah dalam menghindari penyediaan atas jasa berlebihan serta memperluas sektor publik yang tiada perlu.

Disamping itu, pendapat Devas (dalam Anggoro, dkk., 2023:212) bahwa pungutan retribusi daerah menjadi biaya yang wajib dibayar penduduk atas pelayanan yang tersedia pemerintah daerah berupa imbalan yang sebanding. Menurut Zorn (dalam Anggoro, dkk., 2023:212) bahwa didapati tiga syarat penting yang wajib terpenuhi pada pungutan retribusi jasa atau barang yakni pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan pemungutan serta sukarela.

1. **Bentuk Retribusi**

Pendapat Bird (dalam Anggoro, dkk., 2023:213) menyatakan bentuk retribusi yang sering kali dijumpai ada tiga, meliputi:

1. Biaya layanan, contohnya iuran izin serta pungutan kecil lainnya yang dikenakan terhadap harga yang dibayarkan misalnya KTP serta akta cacatan sipil.
2. Harga publik, yaitu perolehan yang diterima pemerintah daerah atas barang privat atau pelayanan. Prinsip yang digunakan ialah kompetitif sebagaimana pada sistem pasar yang berlaku.
3. Biaya manfaat khusus atau sering kali disebut *specific benefit tax* sebab bukan seperti biaya yang secara sukarela dibayarkan walaupun biaya yang dibayar berdasarkan ketentuan peraturan merepresentasikan sebesar kontribusi yang wajib dibayarkan ke pemerintah daerah sebab dari keuntungan jasa yang digunakan.
4. **Tujuan Retribusi**

Pendapat Fisher (dalam Noviani & Masdjojo, 2020:5) ahli keuangan negara serta daerah menjelaskan bahwa secara teori pemungutan retribusi wajib mencapai dua tujuan. Berikut ini tujuan retribusi:

1. Retribusi perlu menyebabkan wajib retribusi menerima nilai sesungguhnya dari ketetapan konsumsi tersebut dan mengadakan insentif untuk pilihan efektif.
2. Pemungutan retribusi bertujuan untuk menurunkan ketergantungan pajak daerah.
3. **Fungsi Retribusi**
4. Fungsi dari retribusi meliputi (Miswar, dkk., 2021:157):
5. Sebagai Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Apabila pemerintah daerah sudah mempunyai sumber penerimaan yang dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mempunyai tanggung jawab besar untuk tujuan ikut serta menyokong infrastruktur daerah. Ikut serta pemerintah pusat perihal rancangan daerah dapat berupa penyerahan sumbangan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apresiasi semacam insentif aparatur pemerintah daerah.

1. Mengatur Aktivitas Perekonomian Daerah

Aktivitas perekonomian berjalan serta mampu ditetapkan dengan adil apabila sumber keuangan mencukupi maupun memenuhi. Dengan demikian perekonomian daerah, yang mana retribusi sebagai sumber keuangan. Oleh sebab itu, aktivitas perekonomian daerah pada pos tertentu mampu berjalan benar sekaligus tidak terhambat.

1. Media Stabilitas Perekonomian Daerah

Retribusi yang diterima pada kas daerah secara berkala mampu menjadikan perekonomian pada kondisi tetap sebab beban pelaksanaan daerah telah dibantu retribusi.

1. Meratanya Pembangunan dan Perolehan Penduduk

Apabila diatas tercukupi dengan adanya retribusi, maka meratanya pembangunan serta perolehan penduduk mampu terlaksana yang sekaligus meningkatkan kemakmuran maupun taraf hidup penduduk.

1. Fungsi retribusi berdasarkan Soewondo (dalam Ismiwati & Alfiani, 2021:55) antara lain:
2. Fungsi Pendapatan

Pemungutan retribusi dapat dijadikan media dalam memperoleh biaya untuk daerah mengenai kemudahan menyediakan jasa maupun jasa publik.

1. Fungsi Pengaturan

Pemungutan retribusi digunakan menjadi media dalam menyusun tata hidup ekonomi maupun sosial publik.

1. Fungsi Manfaat

Retribusi hendaknya mampu meningkatkan kesanggupan biaya pendapatan daerah dan peningkatan laju perkembangan ekonomi.

1. **Unsur-Unsur Retribusi**

Unsur-unsur dalam retribusi sebagai berikut (Miswar, dkk., 2021:157):

1. Pungutan retribusi sesuai dengan peraturan retribusi.
2. Pungutan retribusi dapat memaksa.
3. Pungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
4. Bermanfaat sebagai pengeluaran penduduk umum.
5. Prestasi atau imbalan mampu dinikmati secara langsung oleh wajib retribusi.
6. **Ciri-Ciri Retribusi**

Menurut Siahaan (dalam Moenek & Santoso, 2019:142) ciri-ciri retribusi adalah:

1. Retribusi ialah pungutan yang dipungut berdasar kepada suatu peraturan retribusi.
2. Perolehan pendapatan retribusi masuk pada kas pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Wajib retribusi yang membayar retribusi menerima imbalan langsung dari pembayaran yang dilaksanakannya.
4. Retribusi terutang jika terdapat pelayanan yang dilaksanakan daerah yang didapat baik perorangan atau badan.
5. Sanksi retribusi ialah sanksi ekonomis, yaitu apabila tidak membayar iuran tersebut maka tidak mendapat pelayanan yang dikelola daerah.
6. **Sifat Retribusi**

Menurut Haritz (dalam Noviani & Masdjojo, 2020:5) sifat retribusi yaitu:

1. Penyelenggaraan retribusi bersifat ekonomi.
2. Adanya balasan langsung untuk wajib retribusi.
3. Iuran dari retribusi mencukupi persyaratan resmi maupun material namun terdapat alternatif membayar.
4. Retribusi lazimnya adalah pungutan yang fungsi budgetairnya tidak terlihat nyata.
5. Dalam hal tertentu retribusi diselenggarakan untuk maksud tertentu, namun pada hal tertentu retribusi tidak lebih dari mengembalikan anggaran yang sudah dibukukan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan penduduk.
6. **Asas Pemungutan Retribusi**

Asas pemungutan retribusi daerah ialah (Toduho, dkk., 2014:1093):

1. Keadilan

Penarikan retribusi dilakukan dengan mencermati tujuan hukum yakni dapat berlaku adil, baik dalam kebijakan daerah dan pelaksanaan pemungutan. Berarti dalam peraturan maupun pelaksanaan pemungutan retribusi wajib bagi mereka yang memakai pelayanan atau barang serta tanpa membedakan antara objek lain dengan objek satu.

1. Yuridis

Pemungutan retribusi wajib selaras dengan hukum atau ketentuan peraturan, dalam arti:

1. Pemungutan retribusi mendapat tanggungan yang baik pada daerah.
2. Iuran retribusi daerah selaras pada ketentuan berlaku serta wajib berpedoman keadilan.
3. Ekonomis

Iuran retribusi tanpa merusak keseimbangan maupun kemudahan jalur ekonomi, ini berarti:

1. Iuran retribusi daerah wajib tanpa menggangu kemudahan produksi maupun perniagaan.
2. Iuran retribusi daerah tanpa menghambat aktivitas penduduk serta tidak merugikan publik.
3. **Objek Retribusi**

Objek retribusi daerah yaitu pelayanan yang tersedia pemerintah daerah (Rumengan, dkk., 2020:4). Jasa yang tersedia dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi jasa umum yaitu iuran atas pelayanan yang tersedia oleh pemerintah daerah untuk tujuan kebutuhan serta manfaat publik dan dinikmati baik perorangan atau suatu badan (Anggoro, dkk., 2023:215). Retribusi jasa umum memiliki kriteria:
3. Sifat retribusi jasa umum yaitu bukan pajak maupun bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
4. Jasa umum adalah wewenang pemerintah daerah untuk tujuan asas desentralisasi.
5. Jasa umum mendapatkan manfaat spesifik untuk perorangan atau suatu badan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum. Jasa umum juga untuk kebutuhan serta manfaat publik.
6. Jasa umum wajar dipungut.
7. Retribusi jasa umum sesuai peraturan nasional tentang penyelenggaraannya.
8. Retribusi jasa umum mampu dikenakan efisien maupun efektif, serta retribusi jasa umum menjadi sumber penerimaan suatu pemerintah daerah yang memiliki potensi.
9. Pungutan retribusi jasa umum memungkinkan penggunaan jasa pada tingkat atau kualitas jasa yang wajar.
10. Subjek retribusi jasa umum yaitu perorangan atau suatu badan yang menggunakan penyediaan atas jasa umum (Anggoro, dkk., 2023:217).
11. Wajib retribusi jasa umum ialah perorangan atau badan yang berdasarkan kebijakan yang berlaku diharuskan melaksanakan pembayaran. Ini termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum (Anggoro, dkk., 2023:217).
12. Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Sesuai pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Prinsip serta sasaran pada ketetapan tarif retribusi jasa umum diatur dengan melihat pengeluaran menyediakan pelayanan, kemampuan penduduk, faktor keadilan, serta efesiensi kendali atas jasa. Pengeluaran yang dimaksud yaitu pengeluaran operasional, modal, bunga, serta pemeliharaan.
2. Prinsip serta sasaran pada ketetapan tarif retribusi jasa umum yang diserahkan oleh BLUD diatur selaras dengan ketentuan kebijakan.
3. Jenis retribusi jasa umum pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah seperti puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah, puskesmas, balai pengobatan, puskesmas keliling, serta tempat jasa kesehatan lain yang serupa. Tidak termasuk jasa administrasian.

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pelayanan kebersihan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu pengumpulan atau pengambilan sampah dari asalnya menuju tempat pembuangan sampah sementara, mengangkut sampah dari asalnya atau tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan akhir sampah atau pengolahan akhir sampah, menyediakan tempat pengolahan akhir sampah, menyediakan sedot kakus, serta mengolah limbah berwujud cair seperti industri, rumah serta perkantoran. Ini tidak termasuk jasa kebersihan tempat ibadah, sosial, taman, jalan umum serta tempat umum lain.

1. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum ialah menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diatur pemerintah daerah selaras pada kententuan kebijakan.

1. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar yaitu jasa penyediaan yang dikelola pemerintah daerah berupa sarana pasar rakyat seperti los, kios maupun pelataran.

1. Retribusi Jasa Usaha
2. Retribusi jasa usaha merupakan retribusi pelayanan yang tersedia oleh pemerintah daerah yang sifatnya memperoleh keuntungan sebab dapat pula tersediakan oleh pihak swasta (Anggoro, dkk., 2023:217). Berikut ini jasa yang tersedia pemerintah daerah bersifat komersial:
3. Jasa dengan memanfaatkan potensial daerah yang tidak dapat digunakan secara efisien; dan
4. Jasa pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha mempunyai kriteria:

1. Sifat dari retribusi jasa usaha tidak pajak maupun tidak retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.
2. Jasa usaha tersebut merupakan pelayanan yang sifatnya komersial selayaknya tersediakan pihak swasta namun belum mencukupi atau adanya harta yang dikuasai pemerintah daerah yang belum digunakan secara menyeluruh oleh daerah. Bukan merupakan surat berharga, uang kas, serta harta lain yang sifatnya lancar. Untuk harta tidak bergerak serta bergerak merupakan definisi harta.
3. Subjek retribusi jasa usaha ialah perorangan atau lembaga yang memakai pelayananan atas jasa usaha (Anggoro, dkk., 2023:219).
4. Wajib retribusi jasa usaha yaitu perorangan atau lembaga yang berdasarkan ketentuan kebijakan yang berlaku diharuskan dalam melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemotong atau pemungut retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha tidak dikenakan jika potensi pendapatannya rendah atau untuk kepentingan ketentuan dari pemerintah daerah (Anggoro, dkk., 2023:219).
5. Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

Sebagaimana pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Prinsip serta sasaran pada ketetapan tarif retribusi jasa usaha ditujukan untuk mendapat komersial yang wajar. Komersil yang wajar yaitu laba yang didapat jika pelayananan jasa usaha diselenggarakan secara efektif serta orientasinya pada perolehan pasar.
2. Prinsip serta sasaran pada ketetapan tarif retribusi jasa usaha yang diserahkan oleh BLUD diatur berdasarkan kebijakan berlaku yang mengurus tentang BLUD.
3. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
4. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha terdiri atas pertokoan, pasar grosir, serta tempat kegiatan usaha lainnya ialah retribusi atas penyediaaan tempat kegiatan usaha yang terselenggara pemerintah daerah seperti sarana pasar/pertokoan yang dikontrakkan, sarana pasar grosir serta tempat aktivitas usaha lain.
5. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, serta hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yaitu retribusi atas menyediakan tempat lelang yang secara spesifik diselenggarakan pemerintah daerah meliputi pelaksanaan lelang hasil hutan, hewan ternak, ikan, serta perolehan bumi termasuk pelayanan lelang serta infrastruktur yang tersedia ditempat pelelangan tersebut. Termasuk tempat pelelangan yang disewa pemerintah daerah dengan pihak luar yang digunakan untuk tempat melakukan lelang.
6. Retribusi penyediaan tempat khusus pakir di luar badan jalan yakni retribusi atas penyediaan yang dikelola pemerintah daerah berupa tempat khusus parkir di luar badan jalan.
7. Retribusi jasa rumah pemotongan hewan ternak adalah retribusi atas jasa yang dikelola pemerintah daerah dengan menyediakan fasilitas memotong hewan ternak seperti jasa memeriksa kesehatan hewan ternak sebelumnya serta setelah pemotongan.
8. Retribusi jasa tempat olahraga, pariwisata, serta rekreasi merupakan retribusi atas jasa olahraga, pariwisata, serta tempat rekreasi yang dikelola pemerintah daerah.
9. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yaitu retribusi atas menjual perolehan produksi usaha daerah dari pemerintah daerah.
10. Retribusi pemanfaatan aset daerah ialah pemungutan atas manfaat aset daerah yang tanpa menggangu pelaksanaan fungsi serta tugas susunan aparatur daerah atau mengoptimalkan modal daerah namun tanpa mengubah kepemilikan selaras dengan kebijakan berlaku.
11. Retribusi Perizinan Tertentu
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas aktivitas tertentu daerah yang berkaitan dengan memberi izin untuk perorangan atau suatu badan yang diartikan untuk membina, mengatur, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas, memanfaatkan ruang, dan pemakaian sumber daya berupa barang, alam, sarana, prasarana, atau fasilitas lain untuk menjaga kebutuhan publik serta melindungi lestarinya lingkungan (Anggoro, dkk., 2023:220). Retribusi perizinan tertentu memiliki kriteria yaitu:
13. Perizinan tertentu diatas tergolong wewenang pemerintah yang diberikan kepada daerah dengan skema atas dasar desentralisasi.
14. Perizinan tertentu yang bersangkutan sungguh-sungguh diharuskan untuk menjaga kebutuhan publik.
15. Biaya sebagai beban daerah untuk tujuan terselenggaranya izin bersangkutan maupun biaya dalam mengatasi pengaruh negatif dari pemberian izin bersangkutan lumayan banyak sehingga wajar dibiayai dari retribusi perizinan tertentu.
16. Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu perorangan atau suatu badan yang mendapatkan izin tertentu dari daerah (Anggoro, dkk., 2023:222).
17. Wajib retribusi perizinan tertentu ialah perorangan atau suatu badan yang berdasarkan kebijakan berlaku yang diharuskan dalam melaksanakan pembayaran atas retribusi perizinan tertentu, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Mekanisme memberi perizinan tertentu dilakukan selaras dengan ketentuan peraturan (Anggoro, dkk., 2023:222).
18. Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah prinsip serta sasaran pada ketetapan tarif retribusi perizinan tertentu Kota Tegal sesuai tujuan dalam menutupi sebagian atau semua biaya pelaksanaan memberikan izin tersebut. Biaya pelaksanaan memberikan izin meliputi:

1. Biaya pengaruh negatif dari pemberian izin tertentu;
2. Penatausahaan;
3. Biaya penerbitan dokumen izin;
4. Penegakan hukum; atau
5. Pengawasan.
6. Jenis retribusi perizinan tertentu sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
7. Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pelayanan PBG yaitu penerbitan PGB serta SLF dari pemerintah daerah yang tidak bertentangan pada ketentuan peraturan.

Penerbitan PBG serta SLF ialah aktivitas jasa konsultasi pemenuhan standar teknis; penerbitan PBG; pencetakan plakat SLF; pemeriksaan bangunan gedung; tulisan tanda kepemilikan bangunan gedung dan penerbitan SLF.

Penerbitan SlF serta PBG diberikan dalam pengajuan persetujuan bangunan baru; telah terbangun bangunan gedung serta belum mempunyai SLF atau PBG; perubahan persetujuan bangunan gedung; serta peralihan PBG yang tidak diperlukan dalam pekerjaaan perawatan dan pekerjaan pemeliharaan.

Perubahan PBG meliputi perubahan tampak bangunan gedung; pembetulan bangunan gedung yang terdapat pada wilayah cagar budaya; perkuatan bangunan gedung pada tingkat kondisi kerusakan berat atau sedang; perubahan fungsi bangunan gedung; pengembangan atau perlindungan bangunan gedung cagar budaya; perubahan lapis bangunan gedung; perubahan dimensi serta spesifikasi komponen dibangunan gedung yang mempengaruhi dari segi kesehatan dan/atau keselamatan; dan perubahan luas bangunan gedung.

Retribusi tersebut tidak termasuk memberi izin persetujuan bangunan milik pemerintah daerah, pusat, serta bangunan yang berfungsi untuk peribadatan ataupun keagamaan.

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing yaitu jasa mengesahkan rancangan tentang tenaga kerja asing pada daerah yang tidak bertentangan kebijakan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Pungutan tersebut tanpa termasuk penggunaan tenaga kerja asing oleh lembaga keagamaan, badan internasional, instansi pemerintah pusat, jabatan tertentu pada lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan perwakilan negara lain.

1. **Retribusi TPI**
2. Golongan Retribusi TPI

Sebagaimana pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi TPI termasuk golongan retribusi jasa usaha.

1. Dasar Hukum Tarif Retribusi TPI

Dasar hukum tarif dari retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Definisi Retribusi TPI

Retribusi TPI merupakan pemungutan sebagai pembayaran jasa usaha atas TPI yang secara spesifik tersedia oleh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan lelang ikan termasuk pelayanan lelang ikan dan sarana prasarana lain yang telah tersedia di TPI (Somantri, 2016:97).

1. Objek Retribusi TPI

Objek retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal yaitu penyediaan TPI yang secara spesifik tersedia pemerintah daerah dalam melaksanakan lelang ikan termasuk pelayanan lelang ikan dan sarana prasarana yang telah tersedia di TPI.

1. Subjek Retribusi TPI

Subjek retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal adalah perorangan ataupun badan yang memakai pelayanan dan fasilitas baik nelayan dan bakul di TPI Pelabuhan Kota Tegal. Subjek retribusi yang dikenakan kewajiban membayar retribusi TPI menjadi wajib retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal.

1. Sistem Pemungutan Retribusi TPI

Sistem pemungutan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal yaitu *official assessment system*, adalah pemungutan retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal berdasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan seperti Surat Penerimaan dari Bakul (SPB) untuk Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal dan Surat Permintaan Uang (SPU) bagi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal.

1. Contoh Perhitungan Tarif Retribusi TPI

Berikut ini adalah contoh dari perhitungan tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal:

1. Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal

Nelayan dengan perolehan 16.646 Kg ikan mendapatkan raman sebesar Rp. 196.274.000 dengan rincian tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal berikut ini:

Tabel 4  
Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Ikan** | **Tarif (Rp)** | **Meter2** | **Hasil (Rp)** |
| Kemari & Kembung | 55.200 | 1 | 55.200 |
| Bawal Hitam | 67.500 | 0,5 | 33.750 |
| Layang Deles | 48.300 | 0,5 | 24.150 |
| Layang Cempluk | 44.850 | 2 | 89.700 |
| Siro Lembut | 17.250 | 10 | 172.500 |
| Siro Japuh | 17.250 | 0,5 | 8.625 |
| Tanjan | 20.700 | 0,5 | 10.350 |
| Wais | 20.700 | 2 | 41.400 |
| Layur Jogor | 32.400 | 0,5 | 16.200 |
| **Jenis Ikan** | **Tarif (Rp)** | **Meter2** | **Hasil (Rp)** |
| Selar Gabret | 34.500 | 0,25 | 8.625 |
| Tongkol Jabrik PS | 69.000 | 12,5 | 862.500 |
| Tongkol Lurik Otak-Atik PS | 41.400 | 5 | 207.000 |
| Tongkol Lisong PS | 38.400 | 11 | 422.400 |
| Teros | 24.300 | 9 | 218.700 |
| Pirik | 6.900 | 0,75 | 5.175 |
| Ikan Lain-Lain | 6.900 | 24,75 | 170.775 |
| Jumlah | | 80,75 | 2.347.050 |

Sumber: TPI Pelabuhan Kota Tegal

Pada perhitungan diatas nelayan dipungut tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal sebesar Rp. 2.347.050 dan nelayan mendapatkan haknya sebanyak Rp. 193.926.950, pengurangan dari raman Rp. 196.274.000 dengan tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota untuk nelayan tersebut yaitu Rp. 2.347.050.

1. Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal

Bakul memenangkan lelang ikan di TPI Pelabuhan Kota Tegal dengan raman sejumlah Rp. 9. 570.000 yang dipungut tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 5  
Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Ikan** | **Tarif (Rp)** | **Meter2** | **Hasil (Rp)** |
| Siro Lembut | 11.500 | 1 | 11.500 |
| Tongkol Lisong PS | 25.600 | 2,5 | 64.000 |
| Ikan Lain-Lain/Campur | 4.600 | 2 | 9.200 |
| Jumlah | | 5,5 | 84.700 |

Sumber: TPI Pelabuhan Kota Tegal

Berdasarkan perhitungan tersebut bakul dipungut tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal sebesar Rp. 84.700 sehingga bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal harus membayar sejumlah Rp. 9.654.700, penjumlahan dari raman senilai Rp. 9.570.000 dengan tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal untuk bakul sebanyak Rp. 84.700.

Dan apabila bakul tersebut telah memberikan deposit (uang jaminan) sebesar Rp. 1.000.000 dengan demikian bakul membayar Rp. 8.654.700, pengurangan dari Rp. 9.654.700 dengan Rp. 1.000.000 yang merupakan deposit (uang jaminan).

1. **Praktek**
2. Dasar hukum penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal adalah Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal sebagai berikut:
4. Ikan yang hendak dilelang di TPI Pelabuhan Kota Tegal berasal dari kapal perikanan yang tiba di Pelabuhan Kota Tegal. Nelayan melaporkan kedatangan kapal kepada Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal. Setelah itu nelayan akan memperoleh daftar urut lelang ikan dari Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal. Daftar urut lelang ikan menggunakan kode abjad. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal menulis kode abjad sebagai daftar urut lelang ikan dan nama kapal di papan tulis yang tersedia.
5. Kepala Urusan Teknik Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal memerintah nelayan untuk membongkar perolehan tangkapan ikan dari kapal ikan.
6. Perolehan penangkapan ikan dari laut yang hendak dilelang dalam kondisi sudah disortir berdasarkan jenis ikan dan dimasukkan ke dalam keranjang untuk ditimbang. Melaksanakan penimbangan dengan Juru Timbang TPI Pelabuhan Kota Tegal disaksikan oleh Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal serta diberi karcis timbang yang menyatakan berat ikan. Juru Timbang TPI Pelabuhan Kota Tegal juga mencatat semua berat ikan dalam satuan kg hingga selesai. Setelah selesai berat ikan dijumlahkan, kemudian total berat ikan dicatat lantas diserahkan ke Kasir Pembantu TPI Pelabuhan Kota Tegal. Ikan yang sudah ditimbang lantas diberi karcis timbang lalu ditata per jenis ikan dengan rapi di lantai TPI Pelabuhan Kota Tegal dan ikan siap untuk dilelang.
7. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal menulis daftar peseta lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal pada papan tulis yang tersedia. Peserta lelang adalah bakul yang akan membeli ikan di TPI Pelabuhan Kota Tegal. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal juga mencatat daftar peserta lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal pada kertas yang tersedia lalu diserahkan ke Kaur Teknik Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal.
8. Pelelangan ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal dilakukan dengan terbuka dari segi harga.
9. Pelaksanaan pelelangannya disaksikan Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal dan diikuti seluruh peserta lelang yaitu Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal.
10. Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal dilakukan dengan sistem penawar tertinggi selaku pemenang.
11. Sebelum pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan berlangsung Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal dapat terlebih dahulu memberikan deposit (uang jaminan) untuk lelang ikan kepada Kasir Terima TPI Pelabuhan Kota Tegal.
12. Penyelenggaraan lelang ikan TPI Pelabuhan Kota dipandu dengan menawarkan jenis ikan, berat ikan dan kualitas ikan oleh Juru Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal. Dilanjutkan oleh Kaur Teknik Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal dengan menyebutkan pasaran harga lelang ikan. Dan Kaur Teknik Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal yang dapat menunjuk bakul pemenang dari lelang ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal dengan menyebutkan nama bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal yang ada didaftar peserta lelang pada kertas pemberian Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal.
13. Pada saat berlangsungnya penyelenggaraan lelang ikan
14. Juru Tulis Karcis Lelang TPI Pelabuhan Kota Tegal menulis nama bakul pemenang lelang ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal dan harga lelang ikan pada karcis lelang bakul maupun nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal beserta tanggal lelang ikan.
15. Juru buku bakul dan juru buku nelayan menulis nomor karcis lelang, nama bakul pemenang lelang ikan, harga lelang ikan, berat ikan, jenis ikan di buku bakul dan buku nelayan.
16. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal bagian satu mencatat nama kapal, nama bakul pemenang lelang ikan, jenis ikan, berat ikan dan keranjang yang digunakan pada setiap lelang ikan.
17. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal bagian dua memberikan kertas bertulis nama bakul pemenang lelang ikan pada ikan yang telah dimenangkan oleh bakul lelang ikan tersebut.
18. Juru Statistik TPI Pelabuhan Kota Tegal mencatat berat ikan, jenis ikan, nama bakul pemenang lelang ikan, dan kode abjad kapal.

Dilakukan seterusnya hingga penyelenggaraan lelang ikan di TPI Pelabuhan Kota Tegal selesai.

1. Juru Kebersihan TPI Pelabuhan Kota Tegal akan membersihkan lokasi TPI pada saat penyelenggaraan lelang ikan berakhir.
2. Setelah penyelenggaraan lelang ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal sudah selesai maka karcis lelang nelayan akan dicocokkan dengan nelayan bersama Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal. Apabila ada kesalahan tulisan di karcis lelang nelayan maka penulisan pada karcis lelang nelayan maupun bakul dapat diperbaiki oleh Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal.
3. Sesudah itu karcis lelang bakul dikumpulkan berdasarkan nama bakul pemenang lelang ikan dan ditulis kode abjad kapal oleh Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal.
4. Ketika sudah semua terkumpul sesuai nama bakul pemenang lelang ikan, Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal menjumlah semua harga lelang ikan yang didapat bakul pemenang lelang ikan sebagai raman kotor menggunakan kalkulator kemudian hasil penjumlahan dari raman kotor ditulis pada bagian belakang karcis lelang bakul dilakukan satu per satu berdasarkan nama bakul pemenang lelang ikan.
5. Untuk nelayan, semua harga lelang ikan dijumlah sebagai raman kotor menggunakan kalkulator lalu hasil penjumlahan tersebut ditulis di bagian belakang karcis lelang nelayan oleh Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal beserta total berat ikan dalam satuan kg yang diperoleh dari Juru Timbang TPI Pelabuhan Kota Tegal.
6. Nelayan dan bakul dipungut tarif retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini tarif untuk retribusi nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal:

Tabel 6  
Tarif Retribusi Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 1 | Banyar  Banyar Kemari  Kemari & Kembung  Kemari Lembut  Kemari Rencek | Per m2 | 103.500 |
| Per m2 | 82.800 |
| Per m2 | 55.200 |
| Per m2 | 34.500 |
| Per m2 | 20.700 |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 2 | Bentong  Bentong Mandring  Mandring  Mandring Lembut | Per m2 | 75.900 |
| Per m2 | 69.000 |
| Per m2 | 51.750 |
| Per m2 | 24.150 |
| 3 | Tenggiri PS  Tenggiri PS Lembut | Per m2 | 140.400 |
| Per m2 | 102.600 |
| 4 | Kawang  Kawang Colet | Per m2 | 91.800 |
| Per m2 | 67.500 |
| 5 | Cumi  Cumi CK  Cumi Cendol | Per m2 | 147.00 |
| Per m2 | 73.500 |
| Per m2 | 52.500 |
| 6 | Bawal Hitam  Bawal Hitam Lembut  Bawal Hitam Tiplek | Per m2 | 67.500 |
| Per m2 | 47.250 |
| Per m2 | 29.700 |
| 7 | Layang Deles  Layang Deles Bloco  Layang Deles Lembut  Layang Deles Rencek | Per m2 | 48.300 |
| Per m2 | 31.050 |
| Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 17.250 |
| 8 | Layang Cempluk  Layang Cempluk Bloco  Layang Cempluk Lembut  Layang Cempluk Rencek | Per m2 | 44.850 |
| Per m2 | 31.050 |
| Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 13.800 |
| 9 | Siro  Siro Lembut  Siro Japuh | Per m2 | 31.050 |
| Per m2 | 17.250 |
| Per m2 | 17.250 |
| 10 | Tanjan  Tanjan Cikong | Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 13.800 |
| 11 | Wais | Per m2 | 20.700 |
| 12 | Bloso | Per m2 | 12.000 |
| 13 | Layaran  Layaran Lembut | Per m2 | 15.600 |
| Per m2 | 19.800 |
| 14 | Wudun  Wudun Lembut  Manyung Keting  Manyung Songot | Per m2 | 13.200 |
| Per m2 | 7.200 |
| Per m2 | 6.000 |
| Per m2 | 24.000 |
| 15 | Cucut  Cucut Gonol | Per m2 | 15.600 |
| Per m2 | 9.600 |
| 16 | Peh Pari | Per m2 | 12.000 |
| 17 | Larak | Per m2 | 19.800 |
| 18 | Layur Jogor  Layur Canteng | Per m2 | 32.400 |
| Per m2 | 18.000 |
| 19 | Kacangan  Kacangan Lembut | Per m2 | 41.400 |
| Per m2 | 20.700 |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 20 | Wadung  Wadung Lembut | Per m2 | 37.950 |
| Per m2 | 24.150 |
| 21 | Talang | Per m2 | 24.000 |
| 22 | Kimpul | Per m2 | 42.900 |
| 23 | Selar Como  Selar Galuh  Selar Gabret | Per m2 | 75.900 |
| Per m2 | 62.100 |
| Per m2 | 34.500 |
| 24 | Tongkol Jabrik PS  Tongkol Jabrik Otak-Atik PS  Tongkol Lurik PS  Tongkol Lurik Otak-Atik PS  Tongkol Lisong PS  Tongkol Cakalang PS | Per m2 | 69.000 |
| Per m2 | 55.200 |
| Per m2 | 48.300 |
| Per m2 | 41.400 |
| Per m2 | 38.400 |
| Per m2 | 51.750 |
| 25 | Tunul Barakuda | Per m2 | 20.250 |
| 26 | Teros  Teros Celik | Per m2 | 24.300 |
| Per m2 | 18.900 |
| 27 | Tracas | Per m2 | 34.500 |
| 28 | Pirik | Per m2 | 6.900 |
| 29 | Kurisi  Kurisi Tanggung  Kurisi Kecil | Per m2 | 34.500 |
| Per m2 | 24.150 |
| Per m2 | 17.250 |
| 30 | Petek | Per m2 | 10.350 |
| 31 | Kuniran Kuning  Kuniran Kuning Krompyong | Per m2 | 24.150 |
| Per m2 | 13.800 |
| 32 | Selok | Per m2 | 13.800 |
| 33 | Demang  Demang Tanggung  Demang Oyes | Per m2 | 21.000 |
| Per m2 | 15.000 |
| Per m2 | 12.000 |
| 34 | Tongkol Jabrik GN  Tongkol Jabrik Otak-Atik GN  Tongkol Lurik GN  Tongkol Lurik Otak-Atik GN  Tongkol Lisong GN  Tongkol Cakalang GN | Per m2 | 14.400 |
| Per m2 | 12.600 |
| Per m2 | 10.800 |
| Per m2 | 12.600 |
| Per m2 | 10.800 |
| Per m2 | 9.000 |
| 35 | Tenggiri GN  Tenggiri Lembut GN | Per m2 | 45.000 |
| Per m2 | 42.300 |
| 36 | Kawang GN | Per m2 | 27.000 |
| 37 | Ikan Lain-Lain | Per m2 | 6.900 |
| 38 | Campur-Campur | Per m2 | 2.000 |

Sumber: TPI Pelabuhan Kota Tegal

Untuk tarif bakul dikenakan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 7  
Tarif Retribusi Bakul TPI Pelabuhan Kota Tegal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 1 | Banyar  Banyar Kemari  Kemari  Kemari Lembut  Kemari Rencek | Per m2 | 69.000 |
| Per m2 | 55.200 |
| Per m2 | 36.800 |
| Per m2 | 23.000 |
| Per m2 | 13.800 |
| 2 | Bentong  Bentong Mandring  Mandring  Mandring Lembut | Per m2 | 50.600 |
| Per m2 | 46.000 |
| Per m2 | 34.500 |
| Per m2 | 16.100 |
| 3 | Tenggiri PS  Tenggiri PS Lembut | Per m2 | 93.600 |
| Per m2 | 68.400 |
| 4 | Kawang  Kawang Colet | Per m2 | 61.200 |
| Per m2 | 45.000 |
| 5 | Cumi  Cumi CK  Cumi Cendol | Per m2 | 98.000 |
| Per m2 | 49.000 |
| Per m2 | 35.000 |
| 6 | Bawal Hitam  Bawal Hitam Lembut  Bawal Hitam Tiplek | Per m2 | 45.000 |
| Per m2 | 31.500 |
| Per m2 | 19.800 |
| 7 | Layang Deles  Layang Deles Bloco  Layang Deles Lembut  Layang Deles Rencek | Per m2 | 32.200 |
| Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 13.800 |
| Per m2 | 11.500 |
| 8 | Layang Cempluk  Layang Cempluk Bloco  Layang cempluk Lembut  Layang Cempluk Rencek | Per m2 | 29.900 |
| Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 13.800 |
| Per m2 | 9.200 |
| 9 | Siro  Siro Lembut  Siro Japuh | Per m2 | 20.700 |
| Per m2 | 11.500 |
| Per m2 | 11.500 |
| 10 | Tanjan  Tanjan Cikong | Per m2 | 13.800 |
| Per m2 | 9.200 |
| 11 | Wais | Per m2 | 13.800 |
| 12 | Bloso | Per m2 | 8.000 |
| 13 | Layaran  Layaran Lembut | Per m2 | 10.400 |
| Per m2 | 13.200 |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 14 | Wudun  Wudun Lembut  Manyung Keting  Manyung Songot | Per m2 | 8.800 |
| Per m2 | 4.800 |
| Per m2 | 4.800 |
| Per m2 | 16.000 |
| 15 | Cucut  Cucut Gonol | Per m2 | 10.400 |
| Per m2 | 6.400 |
| 16 | Peh Pari | Per m2 | 8.000 |
| 17 | Larak | Per m2 | 13.200 |
| 18 | Layur Jogor  Layur Canteng | Per m2 | 21.600 |
| Per m2 | 12.000 |
| 19 | Kacangan  Kacangan Lembut | Per m2 | 27.600 |
| Per m2 | 13.800 |
| 20 | Wadung  Wadung Lembut | Per m2 | 25.300 |
| Per m2 | 16.100 |
| 21 | Gatep | Per m2 | 32.200 |
| 22 | Kimpul | Per m2 | 28.600 |
| 23 | Selar Como  Selar Galuh  Selar Gabret | Per m2 | 50.600 |
| Per m2 | 41.400 |
| Per m2 | 23.000 |
| 24 | Tongkol Jabrik PS  Tongkol Jabrik Otak-Atik PS  Tongkol Lurik PS  Tongkol Lurik Otak-Atik PS  Tongkol Lisong PS  Tongkol Cakalang PS | Per m2 | 46.000 |
| Per m2 | 36.800 |
| Per m2 | 32.200 |
| Per m2 | 27.600 |
| Per m2 | 25.600 |
| Per m2 | 34.500 |
| 25 | Tunul Barakuda | Per m2 | 13.500 |
| 26 | Teros  Teros Celik | Per m2 | 16.200 |
| Per m2 | 12.600 |
| 27 | Tracas | Per m2 | 23.000 |
| 28 | Pirik | Per m2 | 4.600 |
| 29 | Kurisi  Kurisi Tanggung  Kurisi Kecil | Per m2 | 23.000 |
| Per m2 | 16.100 |
| Per m2 | 11.500 |
| 30 | Petek | Per m2 | 6.900 |
| 31 | Kuniran Kuning  Kuniran Kuning Krompyong | Per m2 | 16.100 |
| Per m2 | 9.200 |
| 32 | Selok | Per m2 | 9.200 |
| 33 | Demang  Demang Tanggung  Demang Oyes | Per m2 | 14.000 |
| Per m2 | 10.000 |
| Per m2 | 8.000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **No.** | **Jenis Ikan** | **Satuan Pemakaian** | **Tarif (Rp)** |
| 34 | Tongkol Jabrik GN  Tongkol Jabrik Otak-Atik GN  Tongkol Lurik GN  Tongkol Lurik Otak-Atik GN  Tongkol Lisong GN  Tongkol Cakalang GN | Per m2 | 9.600 |
| Per m2 | 8.400 |
| Per m2 | 7.200 |
| Per m2 | 8.400 |
| Per m2 | 7.200 |
| Per m2 | 6.000 |
| 35 | Tenggiri GN  Tenggiri Lembut GN | Per m2 | 30.000 |
| Per m2 | 28.200 |
| 36 | Kawang GN | Per m2 | 18.000 |
| 37 | Ikan Lain-Lain/Campur | Per m2 | 4.600 |

Sumber: TPI Pelabuhan Kota Tegal

1. Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal bagian satu menyerahkan catatan jenis ikan, berat ikan, nama bakul pemenang lelang ikan dan keranjang ikan yang digunakan pada setiap lelang ikan kepada Juru Statistik TPI Pelabuhan Kota Tegal.
2. Apabila pada saat lelang, ikan berada pada dua keranjang besar maka dihitung satu m2, untuk ikan yang ada di satu keranjang besar dihitung 0,5 m2 atau ikan pada satu keranjang kecil dihitung 0,25 m2.
3. Juru Statistik dan Satpam TPI Pelabuhan Kota Tegal bagian satu yang menghitung tarif retribusi jasa usaha TPI nelayan dan bakul. Setelah selesai juru statistik menyerahkannya ke Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal.
4. Selanjutnya Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal menghitung raman kotor dengan menambah pungutan tarif retribusi jasa usaha TPI bakul menggunakan kalkulator ditulis beserta tanggal lelang ikan dan nama bakul pemenang lelang ikan pada Surat Penerimaan dari Bakul (SPB). Apabila SPB sudah selesai, pembantu kasir menyerahkan SPB kepada kasir bayar.
5. Untuk nelayan, perhitungan raman kotor lalu dikurangi pungutan tarif retribusi jasa usaha TPI nelayan menggunakan kalkulator diisi di Surat Permintaan Uang (SPU) beserta keterangan nomor karcis lelang, berat ikan dalam satuan kg, tanggal lelang ikan dan nama kapal nelayan oleh Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal. Jika SPU selesai maka SPU diserahkan ke kasir bayar oleh Pembantu Kasir TPI Pelabuhan Kota Tegal.
6. Kasir Bayar TPI Pelabuhan Kota Tegal mendapatkan rincian bakul yang memberikan deposit (uang jaminan) dari Kasir Terima TPI Pelabuhan Kota Tegal.
7. Bakul lelang ikan dapat membayarkan total raman kotor dan tarif retribusi jasa usaha TPI secara tunai atau non tunai sesuai yang tertera pada SPB ke Kasir Bayar TPI Pelabuhan Kota Tegal. Bagi bakul yang sudah memberikan deposit (uang jaminan) dapat melunasinya dihari itu juga ataupun dihari berikutnya. Bakul yang sudah lunas membayarnya mendapatkan SPB sebagai bukti bayar.
8. Nelayan TPI Pelabuhan Kota Tegal mendapatkan haknya dari raman lelang ikan sehabis dikurangi tarif retribusi jasa usaha TPI untuk nelayan sesuai yang tertera pada SPU di Kasir Bayar TPI Pelabuhan Kota Tegal. Bagi nelayan yang telah mengambil haknya dari lelang ikan TPI Pelabuhan Kota Tegal maka nelayan menerima SPU.
9. Juru Buku Retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal menulis perolehan hasil dari retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal baik nelayan dan bakul per hari pada buku retribusi TPI Pelabuhan Kota Tegal.
10. Kasir Bayar TPI Pelabuhan Kota Tegal menyerahkan perolehan hasil retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal ke Kepala Urusan Keuangan TPI Pelabuhan Kota Tegal untuk disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kota Tegal.
11. Hambatan dan kendala penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal adalah adanya kesalahan tulis oleh Juru TPI Pelabuhan Kota Tegal yang tidak saksama dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut merupakan rintangan dan halangan pada saat penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa usaha TPI Pelabuhan Kota Tegal.